

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konflik norma hukum yang terjadi antara penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah pusat dengan ketentuan hukum penataan ruang yang telah ditetapkan di tingkat daerah, khususnya dalam kasus proyek *Surabaya Waterfront Land (SWL)*. Penetapan SWL sebagai PSN melalui Peraturan Presiden tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini menimbulkan konflik norma vertikal maupun horizontal dalam sistem hukum tata ruang Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian tersebut mengancam kewenangan otonomi daerah, menimbulkan ketidak pastian hukum, dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan serta penolakan dari masyarakat lokal. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya sinkronisasi regulasi, mekanisme mediasi antar-lembaga, serta partisipasi publik untuk menciptakan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.

Kata Kunci: Konflik Norma, Proyek Strategis Nasional, Penataan Ruang, Otonomi Daerah, Harmonisasi Kebijakan.

ABSTRACT

This study discusses the conflict of legal norms that occurs between the determination of National Strategic Projects (PSN) by the central government and the provisions of spatial planning laws that have been established at the regional level, specifically in the case of the Surabaya Waterfront Land (SWL) project. The determination of SWL as a PSN through a Presidential Regulation is not in line with Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning and the Surabaya City Regional Regulation concerning Regional Spatial Planning (RTRW). This gives rise to vertical and horizontal norm conflicts in the Indonesian spatial planning legal system. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and case studies.

The research findings indicate that this discrepancy threatens regional autonomy, creates legal uncertainty, and has the potential to cause environmental damage and resistance from local communities. This study recommends the importance of regulatory synchronization, inter-institutional mediation mechanisms, and public participation to create policy harmonization between the central and regional governments in the implementation of national strategic projects.

Keywords: Normative Conflict, National Strategic Projects, Spatial Planning, Regional Autonomy, Policy Harmonization.